

Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat

¹Ami Afriyani, ²Idah Wahidah, ³Muhammad Taufiq Hatta Wibowo

¹ Universitas Padjadjaran, Indonesia; ami19002@mail.unpad.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; iddah@uinsgd.ac.id

³ Universitas Pasundan, Indonesia; muhammad.hatta@mail.unpas.ac.id

Abstract

The presence of the use of information and communication technology in government as a digital-government concept, is aim at helping the government optimize performance in providing services effectively and efficiently. One way for the government to take advantage of new technology is to provide the public with easier access to government information and services and to improve the quality of services provided. The purpose of this study is to describe the application of digital in public services in Sukajaya Village, Sumedang Regency, West Java Province as an effort to improve the quality of public services in the 4.0 era. This research method uses a qualitative descriptive approach, with data collection and techniques used are observation, direct interviews, and literature studies sourced from many articles in journals, books, relevant regulations, information media content related to the focus, and research problems. The results of the study indicate that the application of digital in Sukajaya Village is still in the cataloging stage, where this stage is the digital government process as a one-way communication relationship between the community and the government. In this stage, all forms of announcement information are posted in digital form. This research article concludes that Sukajaya Village in implementing digital government pays attention to government readiness factors, including resource readiness, IT readiness, cognitive readiness, innovation readiness, partnership readiness, cultural readiness, and structural readiness.

Keywords: Local Government, Digital Government, Public Service, Digital Village.

Pendahuluan

Dalam pandangan administrasi publik, Pemerintah digital (*digital-government*) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan aktivitas organisasi sektor publik (Irawati & Munajat, 2018). Hadirnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan sebagai konsep *digital-government*, ditujukan untuk membantu pemerintah mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pelayanan dengan efektif dan efisien. Salah satu cara bagi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan akses publik yang lebih mudah ke dalam informasi dan layanan pemerintah, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan (Pinggar & Salomo, 2020).

Pada dasarnya pemerintah membutuhkan transformasi digital, dalam hal ini pemerintahan digital sangat penting untuk melayani keperluan masyarakat dan kebutuhan ekonomi secara digital (Hadiono & Chandra, 2020). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik akan mengubah cara lama atau konvensional di mana masyarakat secara langsung harus datang ke instansi pemerintah menemui pegawai yang bertugas dan mendapat pelayanan, kemudian berganti ke metode penggunaan digital dimana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, penyediaan data dan informasi serta transaksi dalam pelayanan publik bahkan pengaduan layanan publik. Fenomena tersebut sesuai dengan peraturan presiden tentang SPBE (Sistem pemerintahan berbasis elektronik) yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2018.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia memberikan peluang bagi pemerintah melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya (Peraturan Presiden Nomor 95, 2018). SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah daerah menggunakan teknologi digital untuk menyesuaikan struktur organisasi dan proses yang mendasari penyampaian layanan publik (Pittaway & Montazemi, 2020). Pemerintah Gubernur Jawa Barat mengeluarkan program JABAR DIGITAL SERVICE pada tahun 2019 yang didalamnya memiliki program unggulan “Desa Digital”, Sebuah program pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa melalui literasi digital, IoT, dan ragam inovasi digital. Desa Digital bertujuan mewujudkan desa-desa di Jawa Barat yang mandiri secara digital sehingga meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Kabupaten Sumedang sebagai salah satu pemerintahan daerah yang sudah merespon program desa digital tersebut. Salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tepatnya Desa Sukajaya, merupakan salah satu Desa yang sudah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan di tingkat Desa.

Dari 270 Desa di Kabupaten Sumedang, Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan menjadi salah satu dari dua Desa yang jadi Pilot Projects (percontohan) untuk penilaian lomba inovasi tingkat Jawa Barat pada program SAKIP Desa. Desa Sukajaya memiliki 2 program unggulan melalui digitalisasi, yakni program E-SAKIP dan E- Service. E-SAKIP ini ditujukan untuk mengukur kinerja pemerintahan tingkat desa yang dapat bersinergi pada tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. E-SAKIP desa ini memiliki tiga indikator yaitu Penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dan pelayanan publik. Output tersebut adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Desa dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari.

Sementara untuk pelayanan publik tersendiri pemerintah Desa Sukajaya melakukan transformasi pelayanan menggunakan sistem online (digital), sehingga sistem pelayanan publik di Desa Sukajaya dapat dilakukan secara online. Transformasi pelayanan publik di Desa Sukajaya menghasilkan output yang baik, kendati adanya peningkatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Kenaikan IKM ini dikarenakan pelayanan yang sudah beralih ke digital. Saat ini beberapa pelayanan administrasi dapat dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan *Quick Response* (QR) Code jenis pelayanan digital. Kepala Desa juga telah bisa memberikan tanda tangan elektronik, sehingga proses pelayanan administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun demikian proses transformasi pelayanan di Desa Sukajaya masih mengalami beberapa masalah, seperti masih belum terintegrasinya layanan publik secara menyeluruh, sehingga masyarakat masih melakukan beberapa layanan yang berbeda setiap instansi dan dilakukan dengan cara terpisah. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan adanya transformasi digital dalam pelayanan publik di Desa Sukajaya. Proses transformasi digital belum *complete*, beberapa layanan masih dilakukan dengan cara manual (Wawancara Kepala Desa Sukajaya).

Penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat ini dipilih sebagai fokus dan lokus kajian penelitian ini dikarenakan penelitian ini memiliki kebaruan, yang mana fokus dan lokus penelitian transformasi digital dalam pelayanan publik di Desa Sukajaya belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait dengan *digital transformation* dilakukan oleh Anggita dengan judul “ Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui *E-Government* Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi” yang menyimpulkan bahwa perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan *network service* layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Negara untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat (Anggita Doramia Lumbanraja, 2020).

Penelitian terkait lainnya dilakukan oleh Hadi Krisno dll dengan judul “ Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online)” hasil artikel penelitian ini menggambarkan bahwa transformasi pelayanan publik yang partisipatif telah membawa keberhasilan dalam layanan publik. Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO) yang diterapkan di kelurahan Sawojajar, Malang merupakan bukti dari keberhasilan inovasi dialogis antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem pelayanan publik berbasis aplikasi android digagas dan diciptakan oleh masyarakat Sawojajar sendiri, didukung oleh pemerintah setempat. Inovasi SINGO sendiri berhasil menjadi juara sekaligus pionir bagi kelurahan lainnya (Hadi Krisno et al., 2020).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Permana Devi dll, dengan judul “Implementasi Transformasi Digital Kementerian Agraria Untuk Peningkatan Pelayanan Publik” menyimpulkan bahwa transformasi digital menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. Digitalisasi data pertanahan atau warkah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mencari dan mendistribusi berkas yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan layanan oleh masyarakat. Data pertanahan menjadi kunci dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil survei Balitbang Kementerian Agraria 2018 menunjukkan bahwa unsur-unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah adalah Waktu Pelayanan, Prosedur dan Sarana dan Prasarana. Ketiga unsur tersebut menjadi prioritas utama yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan. Perbaikan pada unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Sarana dan Prasarana (Ahmad, 2020).

Artikel penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dari segi fokus kajian artikel penelitian ini bertujuan menggambarkan sejauhmana konsep transformasi digital dalam layanan publik di Desa Sukajaya dengan mendeskripsikan perubahan layanan online yang telah berjalan di Desa Sukajaya. Selain itu artikel penelitian ini akan mengungkap sejauhmana kesiapan digital tingkat desa dalam penyelenggaraan layanan yang berbasis digital.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa ada dua tradisi untuk menjelaskan keberhasilan pemerintahan digital: (1) berfokus pada pelaksanaan inisiatif ini oleh lembaga pemerintah, dan (2) berfokus pada adopsi pemerintahan digital oleh warga negara dan pengguna lainnya (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020). Transformasi digital juga merujuk tentang *e-government*, dan digital government. Konsep itu sendiri saling terkait dan memiliki kesamaan tentang bagaimana sektor publik menggunakan TIK untuk meningkatkan pemberian layanan, mengubah proses dan budaya organisasi, serta dampaknya pada penciptaan nilai. Untuk memahami transformasi digital dalam pemerintahan atau instansi pada level pusat maupun daerah perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen yang dapat menjelaskan bagaimana dampak

teknologi pada perubahan organisasi (Mergel et al., 2019). Ketiga elemen itu di antaranya : *Using technology to transform service delivery*. Transformasi digital merupakan perubahan dalam mode penyampaian layanan, *Using technology to transform organizational culture and relationships with citizens*. Transformasi digital sebagian besar dilihat sebagai perubahan budaya yang harus terjadi, *Value creation as transformation outcome*. Transformasi digital akan menghasilkan pergeseran paradigma, dimana dalam sektor publik penciptaan nilai ini terjadi dengan adanya kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen.

Penggunaan layanan pemerintahan digital secara aktual akan sangat menentukan tingkat keberhasilan prakarsa pemerintahan digital (Layne & A, 2001). Dengan demikian, mengembangkan layanan pemerintahan digital yang baik secara teknis jelas penting, tetapi mencapai tingkat penggunaan yang tinggi oleh warga adalah sama penting. Ini memetakan perkembangan *evolusioner* yang diantisipasi pemerintahan digital sepanjang dua dimensi. Yang pertama mengacu pada derajat kompleksitas teknologi dan organisasi dalam mode layanan pengiriman. Tingkat kedua integrasi yang terlibat diantara; di satu sisi, vertikal (negara bagian, tingkat lokal regional) dan lainnya lapisan horizontal (hubungan lateral antar tingkat pemerintahan (Ian McLoughlin et al., 2013).

Digital government maturity model ini menggambarkan sejauhmana transformasi layanan publik dalam konsep *digital government* sudah terlaksana atau dalam tahapan apa. Model ini akan menggambarkan sejauh mana penerapan *digital governemnt* antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dengan demikian diharapkan untuk melakukan adopsi praktik tata kelola baru untuk mengakomodasi perkembangan dan hubungan kolaboratif yang dinamis di sekitar pemerintah (Ojo A & B, 2018).

Adanya *transformasi digital* menuntut kesiapan organisasi pemerintaan dan warga negara untuk mengikuti proses perubahan sebagai akibat dari digitalisasi. Dalam hal ini konsep “kesiapan” atau “*digital readiness*” merupakan faktor yang sangat penting. Penerapan *digital government* pada level pemerintah pusat sampai daerah perlu memperhatikan beberapa aspek kesiapan dalam proses penyelenggaraanya. Kesiapan digital ini digunakan untuk mendorong bagaimana penerapan digital di tingkat daerah level Desa bisa diterapkan sebaik mungkin. Adanya kesiapan digital pada organisasi merujuk pada pendapat kesiapan digital organisasi menurut Lokuge dapat menjawab indikasi masalah dalam penelitian ini. Untuk menilai suatu kesiapan organisasi dalam proses digital dapat dilihat dari beberapa faktor (Lokuge et al., 2019) yaitu:

Gambar 1
Model Kesiapan Digital Organisasi



Sumber : (Lokuge Sachithra, Sedera Darshana, Grover Varun, Dongming Xu 2019)

1. *Resource Readiness*

Kesiapan sumber daya telah digunakan untuk menekankan pada fleksibilitas, organisasi harus mengkonfigurasi ulang sumber daya untuk memfasilitasi kebutuhan digital. Kesiapan sumberdaya didefinisikan sebagai fleksibilitas dari sekumpulan keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia yang menjadi fondasi di mana inovasi digital dapat diwujudkan. Di sini penekanannya adalah pada fleksibilitas daripada ketersediaan. Tiga ukuran yang diturunkan kesiapan sumberdaya ini meliputi: sumber daya keuangan yang fleksibel, sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur yang fleksibel.

2. *IT Readiness*

Kesiapan IT diartikan sebagai kekuatan TI untuk memfasilitasi inovasi digital. Tiga langkah-langkah dikembangkan untuk mengukur kesiapan IT, menggunakan stabilitas sistem ketersediaan teknologi digital dan stabilitas infrastruktur TI

3. *Cognitive Readiness*

Kesiapan kognitif diartikan sebagai kekuatan basis pengetahuan dalam suatu organisasi dalam memfasilitasi digital. Tiga ukuran dikembangkan untuk mengukur kesiapan kognitif menggunakan instrumen yang diadaptasi untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi karyawan.

4. *Partnership Readiness*

Kesiapan kemitraan didefinisikan sebagai afiliasi pemangku kepentingan eksternal dengan inovasi digital organisasi, yang dikaitkan dengan tiga jenis kemitraan yang diperlukan untuk inovasi digital. Kesiapan kemitraan mencakup tiga ukuran: hubungan vendor TI kesiapan hubungan dengan konsultan manajemen dan kesiapan untuk menjalin kemitraan dengan pelanggan atau vendor.

5. *Innovation valance*

Konsep valensi inovasi diadaptasi dari konsep valensi perubahan. Kelambu inovasi mengukur kepositifan para pemangku kepentingan terhadap inovasi digital. Ini menyinggung tentang sikap, motivasi, dan pemberdayaan yang dimiliki karyawan untuk inovasi digital, Tiga ukuran dikembangkan untuk mengukur perubahan valance menggunakan sikap karyawan dan pemberdayaan

6. *Culture readiness*

Kesiapan budaya diartikan sebagai kekuatan nilai inti organisasi yang memfasilitasi inovasi digital. Budaya organisasi disorot sebagai faktor penting untuk setiap inovasi. Tiga ukuran digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang budaya: berbagi ide di tempat kerja yang terhubung desentralisasi budaya pengambilan keputusan dan penghindaran risiko

7. *Strategic Readiness*

Kesiapan strategis didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas manajerial yang dilakukan organisasi untuk memfasilitasi inovasi digital. Kesiapan strategis memberikan pengetahuan yang mengkomunikasikan rencana tindakan dan membentuk pedoman kepatuhan dalam inovasi digital. tiga ukuran dikembangkan dan dimasukkan ke dalam model apriori: kejelasan tujuan, relevansi dan komunikasi strategi.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Penerapan *digital government* di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan (Creswell, 2019). Maka metode pendekatan Deskriptif Kualitatif

sangatlah tepat dalam penelitian ini, karena pendekatan tersebut berkaitan dengan pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara mendalam terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam. wawancara bertujuan untuk memperoleh pendapat atau cara pandang dari informan (Creswell, 2019). Selain itu penelusuran berbagai literatur yang relevan dan sumber data berupa dokumen pemerintah, pemberitaan media massa elektronik sebagai sumber data sekunder.

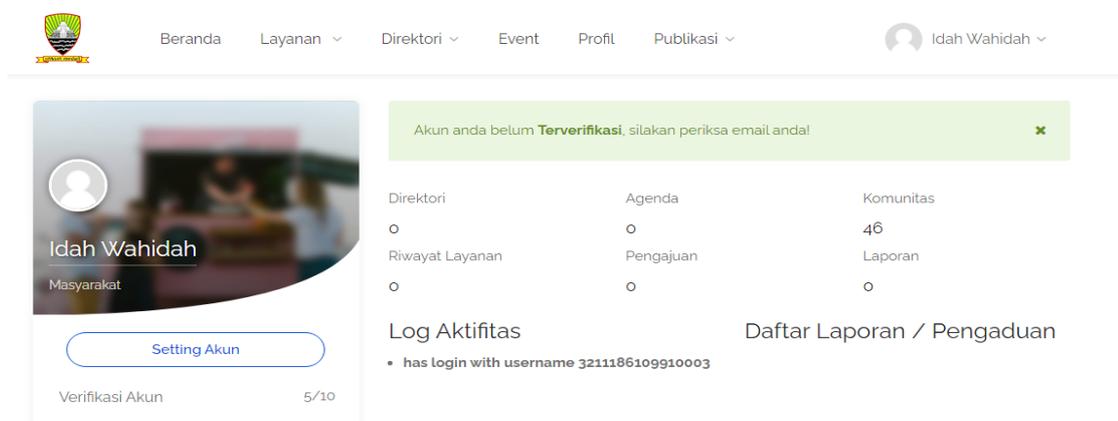
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan informasi dari informan. Pertimbangan tertentu dalam penentuan informan dapat dikarenakan informan merupakan pimpinan sehingga akan memudahkan peneliti dalam mencari informasi tertentu maupun mengarahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang tepat. Dalam penyajian hasil penelitian ini, dilakukan secara deskripsi yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu analisis dan validasi sumber data yang digunakan (Matthew B. Miles et al., 2014). Sehingga hasil dari artikel penelitian ini akan mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana penyelenggaraan digital government di Desa Sukajaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Digital di Desa Sukajaya

Memahami transformasi digital di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan tiga elemen penting. Pertama, menjelaskan bahwa sebagai bentuk upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Konsep ini dikenal dengan *digital government*, Desa Sukajaya sudah mengupayakan proses pelayanan yang mudah, efektif dan efisien yang diberikan kepada masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan layanan yang sebelumnya harus selalu datang ke kantor Desa, sekarang beberapa layanan berbasis digital memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses layanan dengan tidak harus datang ke Kantor Desa. Beberapa layanan yang diberikan seperti SKCK, SKTM, Keterangan Usaha, Domisili Penduduk, Pindah dan Keluar Kewarganegaraan. Tidak hanya itu, beberapa informasi yang diberikan Desa Sukajaya sudah melalui web Desa dengan alamat <https://desasukajaya.sumedangkab.go.id/>, sehingga masyarakat akan selalu mendapatkan update informasi dimanapun dan kapanpun.

Gambar 2
Pelayanan Desa Sukajaya Melalui Website



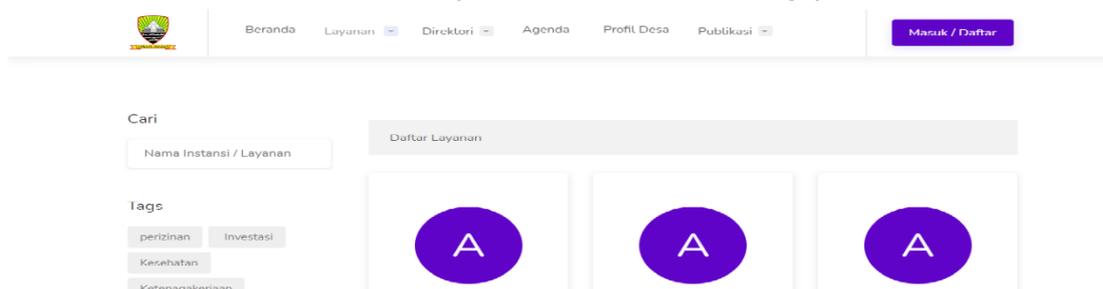
Sumber: <https://desasukajaya.sumedangkab.go.id/layanan#>

Elemen kedua menekankan adanya sebuah budaya baru atau perubahan budaya lama melalui digitalisasi, Desa Sukajaya sudah mengubah struktur dan budaya organisasi lama dengan menyesuaikan tuntutan era 4.0. Misalnya, agenda musyawarah yang menjadi rutinitas penyelenggaraan pemerintah sebagian dilakukan secara virtual, koordinasi RT dan RW di lingkungan Desa Sukajaya sudah melalui *WA Group* dan *Virtual Meeting*, bahkan untuk tandatangan kepala Desa sudah menggunakan tandatangan secara elektronik. Hal ini sangat mempengaruhi budaya layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak lagi terlalu rigid atau kaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dimana masyarakat masih memilih layanan secara konvensional dan ada beberapa layanan mengharuskan masyarakat tetap datang ke kantor Desa. Ketiga, adanya *transformasi digital* di Desa Sukajaya menggeser paradigma baru dimana peran pemerintahan menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Dalam membangun paradigma ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya, diantaranya faktor organisasi (visi, kepemimpinan, dukungan top manajemen, dan kultur organisasi). Sedangkan faktor pengguna kedua yaitu pengguna (kemampuan, pelatihan dan kesadaran) (Watrianthos et al., 2019). Adanya Website Desa selain menjadi media informasi Desa, juga sebagai perantara kepentingan masyarakat yang terintegrasi dengan beberapa pihak baik pemerintahan ataupun sektor swasta. Kolaborasi yang dibangun Desa Sukajaya sudah tahap pelaksanaan, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Budaya organisasi masih perlu beradaptasi melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam menyikapi banyaknya tuntutan dalam transformasi digital. Perangkat Desa belum menciptakan tata kelola yang seutuhnya berbasis digital, hal ini disebabkan sumber daya manusia secara kuantitas masih banyak yang belum paham pola kerja baru.

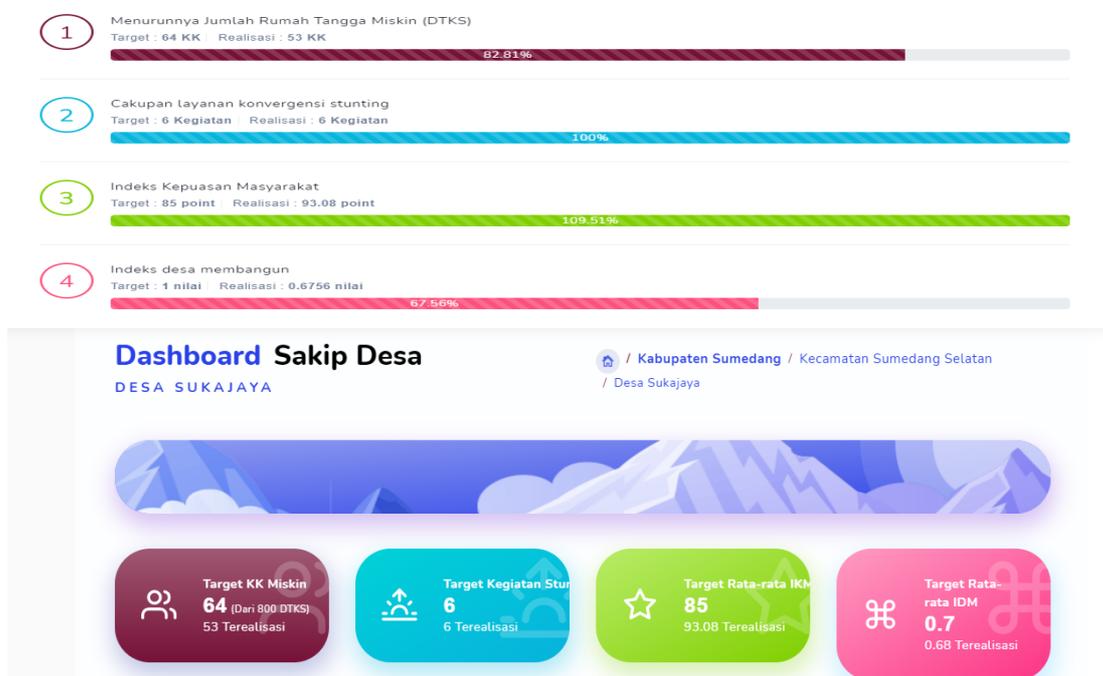
Merujuk pada *digital government maturity* model Desa Sukajaya masih dalam tahap 1 yaitu **katalogisasi** proses *digital government* sebagai hubungan komunikasi satu arah antara masyarakat dengan pemerintahan. Dalam tahap ini segala bentuk informasi pengumuman diposting dalam bentuk digital. Desa Sukajaya mengutamakan website sebagai media informasi terkait kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, SAKIP Desa, SID dan APBDes. Tidak hanya itu, web Desa Sukajaya memberikan berbagai informasi penting untuk masyarakatnya di berbagai bidang. Dalam membangun koordinasi dengan RT dan RW menggunakan WA Group, namun ada beberapa kekurangan yang mana koordinasi tidak begitu terbangun optimal. Sebetulnya website sudah bisa mengakomodir kebutuhan secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan koordinasi karena memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah (Akbar et al., 2019). Berikut gambar website desa sukajaya sebagai bentuk media informasi dan katalogisasi dalam tahapan *digital maturity model* :

Gambar 3
Daftar Informasi Layanan Webiste Desa Sukajaya



Sumber : <https://desasukajaya.sumedangkab.go.id/daftarlayanan>

Gambar 4
informasi E-SAKIP dan E-ABPDes



Sumber : <https://desasukajaya.sumedangkab.go.id/sakip>

2. Kesiapan Desa Sukajaya untuk Melakukan Inovasi Digital

Untuk melakukan inovasi digital penting sekali mengetahui kesiapan Desa Sukajaya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini perlu dilihat seberapa siap Desa Sukajaya mengikuti tuntutan perubahan sebagai bentuk konsekuensi dari digitalisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kesiapan inovasi digital sebagai berikut:

- 1) *Resource Readiness*, Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dan penghambat sebuah Desa dalam membangun desa digital dan menjaga keberlangsungannya (Rokhman & Bahtaruddin, 2019). Kesiapan sumberdaya Desa Sukajaya masih kurang, hal ini dapat dilihat dari keuangan, teknologi dan sumber daya manusia. Kesiapan melakukan inovasi digital di Desa Sukajaya sangat didukung penuh oleh pemerintah Daerah dikarenakan menjadi salah satu Desa yang menjadi *pilot projects* program SAKIP, *e-health* SIMPATI dan Desa CANTIK. Anggaran yang digunakan dalam inovasi digital ini tidak menggunakan ADD melainkan bantuan langsung dari pemerintah Daerah. Teknologi yang

ada pun sudah cukup baik dan sangat mendukung terciptanya layanan berbasis digital, namun yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia yang ada di Desa tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukajaya dimana untuk operator atau yang mempunyai peranan penting dalam penugasan layanan berbasis digital ini sangat terbatas, Desa Sukajaya memberdayakan perangkat Desa yang sebelumnya untuk mampu menjadi operator dan tidak melakukan rekrutmen pegawai baru yang paham IT atau teknologi. Karena keterbatasan perangkat Desa yang paham terkait inovasi digital, hal ini menjadikan proses inovasi digital perkembangan dan kemajuannya cukup lambat.

- 2) *IT Readiness*, kesiapan IT merupakan hal yang paling penting dalam inovasi digital, IT merupakan sarana pendukung atau fasilitas dalam menghadapi disrupsi dalam pelayanan yang diselenggarakan pemerintah (Padjadjaran, 2018). Untuk melihat kesiapan IT dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Sukajaya dapat dilihat dari sistem yang digunakan sebagai media inovasi digital yaitu website Desa Sukajaya yang digunakan untuk media informasi Desa Sukajaya. Stabilisasi sistem teknologi digital sudah tersedia dengan baik, mengingat di lingkungan Desa Sukajaya sudah menggunakan server yang cukup baik. Terkait infrastruktur TI, di lingkungan Desa Sukajaya sudah tersedia wifi yang bisa diakses oleh siapapun dengan kecepatan internet cukup baik.
- 3) *Cognitive Readiness*, kesiapan kognitif sangat penting karena berpengaruh besar terhadap proses adaptasi dalam melakukan inovasi digital, hal ini dapat dilihat dari aspek pengetahuan tentang pentingnya melakukan inovasi digital, pengetahuan menjadi pondasi awal untuk memahami pentingnya hadir digital dalam penyelenggaraan pemerintah sekaligus menjawab tantangan di era 4.0, dimana hadirnya digital sangat mampu membangun tata kelola pemerintahan lebih mudah dan efektif. Nampaknya pengetahuan perangkat Desa Sukajaya sudah cukup baik, mengingat kepala Desa sebagai pimpinan selalu memberikan pemahaman terkait pentingnya teknologi selain kebijakan-kebijakan yang terkait dan Desa Sukajaya termasuk Desa yang cukup berani mengambil keputusan untuk lebih cepat melibatkan digital dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Optimisme dan harapan besar Kepala Desa Sukajaya cukup tinggi untuk mengawali Desa Digital Di Kabupaten Sumedang. Keterampilan yang dimiliki oleh operator perangkat Desa sudah cukup berkompeten dilihat dari pengelolaan website sudah cukup baik, namun dari segi kuantitas nampaknya belum bisa mengakomodir banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak semua perangkat Desa mampu beradaptasi dengan cepat, kemampuan yang dimiliki masih cukup terbatas untuk memahami teknologi. Sehingga masih butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dengan dilakukannya pelatihan IT untuk menunjang perangkat Desa bisa beradaptasi lebih cepat.
- 4) *Partnership Readiness*, kemitraan yang dibangun oleh Desa Sukajaya sedang dilakukan dengan beberapa pihak, pertama dengan pemerintah level atas dalam upaya membangun pola kerja yang bersinergi. Kabupaten Sumedang saat ini sedang berupaya dalam membangun tata kelola berbasis digital, hal inilah yang menjadi acuan Desa Sukajaya selain membangun sinergitas dengan pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan kebijakan juga melaksanakan visi Desa Sukajaya yaitu masyarakat mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemitraan lain yang sudah dibangun yaitu dengan pihak telkomsel, dimana telkomsel merupakan perusahaan yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memanfaatkan kapabilitas digital dan kontribusi sosial melalui teknologi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui *platform e-health SIMPATI*. Tidak hanya itu, Desa Sukajaya merupakan Desa yang terpilih menjadi *role model* Desa CANTIK. *Pilot project* ini merupakan program andalan Badan Pusat statistik di mana Desa Sukajaya menjadi desa yang berbasis statistik yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pemberdayaan masyarakat.

- 5) *Innovation valance*, inovasi digital yang dilakukan Desa Sukajaya memberikan dampak yang cukup positif bagi pemangku kepentingan. Kolaborasi yang dilakukan dengan beberapa pihak memberikan kebermanfaatan bagi pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Desa Sukajaya menjadi penghubung kepentingan masyarakat melalui website yang terintegrasi dengan MPP Kabupaten Sumedang. Dalam upaya memperkuat dan mengembangkan ekosistem digital yang inklusif melalui konsep *device-network-application* (DNA), berharap dapat menghadirkan kontribusi yang berdampak positif bagi kemajuan Desa Sukajaya. Program *e-health* SIMPATI dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menekan angka prevalensi stunting di setiap tahunnya. Aplikasi ini dapat digunakan para kader posyandu untuk melakukan pendataan, pencatatan riwayat pemeriksaan ibu hamil dan anak, serta memberikan wawasan terkait status gizi anak untuk melakukan pencegahan stunting. Program *e-health* ini mendukung pemerintahan Daerah dalam meminimalisir Stunting di Kabupaten Sumedang. Program selanjutnya Desa CANTIK yang merupakan bentuk pembinaan statistik sektoral yang tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Bagi Desa Sukajaya program ini memberikan kontribusi positif dikarenakan akan membangun data yang lebih lengkap untuk pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, Desa CANTIK akan berkolaborasi dengan program Kementerian Desa dalam hal IDM (Indeks Desa Membangun) dan Kementerian Dalam Negeri untuk program Prodeskel. Untuk menciptakan semangat satu data Indonesia sehingga akan terwujudnya keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- 6) *Culture readiness*, kesiapan budaya kerja Desa Sukajaya dalam pelaksanaan inovasi digital masih pada tahap sosialisasi, dimana peran masyarakat masih belum terlihat untuk beradaptasi dengan pelayanan digitalisasi. Dikarenakan Desa Sukajaya saat ini belum mengeksekusi secara maksimal program transformasi digital. Tahapan sosialisasi pun masih sebatas pengenalan bahwa Desa Sukajaya akan melaksanakan pelayanan berbasis online dan menginformasikan adanya website saat ada perkumpulan RT atau RW. Secara khusus pihak pemerintahan Desa belum melakukan sosialisasi khusus bahkan untuk lebih lanjut terkait bimbingan teknis atau panduan penggunaan website. Hal ini menjadi alasan Desa Sukajaya memang belum siap dalam waktu dekat dikarenakan beberapa layanan masih belum bisa dilakukan secara online. Tata kelola secara digital harus melibatkan seluruh perangkat Desa, namun belum semua perangkat desa mampu beradaptasi. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan IT dan bimbingan teknis agar terciptanya budaya kerja yang siap dalam melaksanakan inovasi digital.
- 7) *Strategic Readiness*, aktivitas manajerial untuk memfasilitasi inovasi digital saat ini masih belum terbangun dengan baik, belum adanya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan pelaksanaan transformasi digital belum terealisasi dengan optimal. Landasan yuridis atau rujukan kebijakan masih berkiblat pada kebijakan yang dibuat Daerah Kabupaten Sumedang. Penting sekali adanya sebuah pedoman pelaksanaan atau SOP yang dibuat oleh Desa Sukajaya karena akan membangun pemahaman dan mengkomunikasikan pentingnya sebuah rencana penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien melalui inovasi digital. Strategi ini menjadi alat ukur kesiapan manajerial untuk mencapai sebuah tujuan, relevansi dan komunikasi strategi. Jika kesiapan strategi ini belum ada, sampai kapan pun inovasi digital tidak akan terealisasi secara maksimal.

Simpulan

Berdasarkan *digital government maturity*, model Desa Sukajaya masih dalam tahap katalogisasi, dimana proses *digital government* sebagai hubungan komunikasi satu arah antara masyarakat dengan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukajaya membangun tata kelola baru dimana pelayanan sudah bisa dilakukan dengan mudah, efektif dan efisien melalui website Desa, namun dalam penerapannya website masih digunakan sebagai media informasi. Sulitnya mengubah struktur dan budaya organisasi lama berpengaruh pada lambatnya adaptasi tuntutan era 4.0 atau digitalisasi. Tidak hanya itu, sosialisasi yang tidak maksimal juga berpengaruh pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kesiapan inovasi digital. Faktor yang mempengaruhi perkembangan paradigma baru Desa Sukajaya diantaranya visi, kepemimpinan, dukungan top manajemen, dan kultur organisasi.

Kesiapan Desa Sukajaya dalam inovasi digital masih harus dioptimalkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Diantaranya: Pertama *resource readiness*, Karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat Desa terkait pengetahuan, keterampilan dan kemampuan menjadikan proses inovasi digital perkembangan dan kemajuannya cukup lambat. Kedua *IT readiness*, sarana pendukung atau fasilitas dalam menghadapi disrupsi dalam pelayanan yang diselenggarakan Desa Sukajaya dengan stabilisasi sistem teknologi digital sudah tersedia dengan baik dengan menggunakan server yang baik. Ketiga *cognitive readiness*, tidak semua perangkat Desa mampu beradaptasi dengan cepat, kemampuan yang dimiliki masih cukup terbatas untuk memahami teknologi. Pentingnya peran Kepala Desa untuk memberikan motivasi kepada perangkat Desa pentingnya melakukan inovasi digital. Keempat *partnership readiness*, kemitraan yang dibangun Desa Sukajaya dalam membangun pola hubungan atau kolaborasi sudah cukup baik dengan pemerintah dan sektor swasta. Kelima *innovation valance*, Desa Sukajaya memberikan dampak yang cukup positif bagi pemangku kepentingan. Kolaborasi yang dilakukan dengan beberapa pihak memberikan kebermanfaatannya bagi pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Keenam *culture readiness*, Desa Sukajaya memang belum siap dalam waktu dekat dikarenakan beberapa layanan masih belum bisa dilakukan secara online. Tata kelola secara digital harus melibatkan seluruh perangkat Desa, namun belum semua perangkat desa mampu beradaptasi. Faktor yang terakhir yaitu *strategic readiness*, aktivitas manajerial untuk memfasilitasi inovasi digital saat ini masih belum terbangun dengan baik, belum adanya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan pelaksanaan transformasi digital belum terealisasi dengan optimal.

Referensi

- Ahmad, M. (2020). Senantias. *Implementasi Transformasi Digital Kementerian Agraria Untuk Peningkatan Pelayanan Publik*, 1–10.
- Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Putubasai, E. (2019). Implementasi Website Desa Dalam Pemberian Pelayanan Informasi Pembangunan (Studi Pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pondan Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 1(1), 42–51.
- Anggita Doramia Lumbanraja. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i2.220-231>
- Creswell W. John. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran (Iv)*. Sage.
- Gil-Garcia, J. R., & Flores-Zúñiga, M. Á. (2020). Towards A Comprehensive Understanding

- Of Digital Government Success: Integrating Implementation And Adoption Factors. *Government Information Quarterly*, 27(4), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101518>
- Hadi Krisnho, Listiano, A., & Taqwa Sihidi Irahad. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal Of Government And Civil Society*, 4(1), 114–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438>
- Hadiono, K., & Chandra, R. (2020). *Menyongsong Transformasi Digital* (Pp. 81–85). Proceeding Sendiu.
- Ian Mcloughlin, Wilson, R., & Mike Martin. (2013). *Digital Government At Work A Social Informatics Perspective* (1st Ed.). Oxford University Press.
- Irawati, I., & Munajat, E. (2018). Electronic Government Assessment In West Java Province, Indonesia Ira. *Journal Of Theoretical And Applied Information Technology*, 96(2), 1–17.
- Layne, K., & A, J. L. (2001). Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model. *Government Information Quarterly*, 18(1), 1–15.
- Matthew B. Miles, Huberman, Michael, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (Ed.); 3rd Ed.). Sage.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results From Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Ojo A, A., & B, S. M. (2018). Deploying Governance Networks For Societal Challenges. *Government Information Quarterly*, 35(4), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.001>
- Padjadjaran, U. (2018). *Menguatkan Desa Dengan Teknologi Digital*. <https://www.unpad.ac.id/2018/09/menguatkan-desa-dengan-teknologi-digital/>.
- Peraturan Presiden Nomor 95, 1010 (2018).
- Pinggar, H., & Salomo, R. V. (2020). Readiness Of Digitalization Services For Electronic-Based Government Systems In Agency For The Assessment And Application Of Technology (Bppt). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi Restorika*, 6(1), 1–13.
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-How To Lead Digital Transformation: The Case Of Local Governments. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101474. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474>
- Rokhman, A., & Bahtaruddin. (2019). Model Keberlanjutan Desa Digital Berbasis Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan Ix*, 1–7.
- Sumedang, T. (2021). *Profil Desa Sukajaya*. <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-sukajaya.htm>.
- Watrianthos, R., Nasution, A. P., & Saifullah, M. (2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17(1), 1–8.